

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris hal ini terlihat dari peran utama sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi dan besarnya persentase penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan tahun 2013, kontribusi sektor pertanian pada Produk Domestik Bruto (PDB) berada pada urutan kedua setelah sektor industri pengolahan dan lebih dari 35 persen penduduk bekerja pada sektor pertanian. Meskipun demikian kecenderungan kontribusi sektor pertanian dari waktu ke waktu terus menurun. Hal ini bisa dijelaskan bahwa pada tahun 2003 kontribusi sektor ini sebesar 15,2 persen, namun pada tahun 2013 turun menjadi 14,4 persen. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah produktivitas petani yang masih rendah.

Menurut Kuncoro (2010) beberapa masalah fundamental yang dihadapi oleh sektor pertanian diantaranya adalah masalah kesempatan kerja dan kesejahteraan, masalah kegureman usaha dan permasalahan tanah yang dihadapi baik dari segi ketimpangan distribusi penguasaan tanah maupun dari segi kelangkaan dan tingginya biaya pengolahan tanah. Permasalahan tersebut menyebabkan produktivitas yang rendah yang berimplikasi juga pada rendahnya tingkat pendapatan per tenaga kerja. Hal ini sejalan juga dengan pernyataan Sajogyo (1984) bahwa sumber daya agraria dalam hal ini tanah pertanian merupakan sumber nafkah yang akan menentukan seberapa jauh jangkauan para petani dalam memenuhi kebutuhan pangan, perumahan, pendidikan, dan unsur kesejahteraan lainnya. Lebih lanjut ditambahkan oleh Karimi (2014) bahwa kelangkaan tanah produktif dan modal buat mengolah tanah menjadi penyebab kemiskinan di sektor pertanian dan perdesaan pada umumnya.

Selanjutnya BPS dalam publikasinya menjelaskan berdasarkan hasil survei pendapatan petani bahwa rata-rata rumah tangga usaha pertanian menghasilkan pendapatan satu juta rupiah per bulan. Angka ini belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga usaha pertanian. Hal ini menyebabkan angkatan kerja dalam rumah tangga pertanian mencari pekerjaan di luar sektor pertanian khususnya di sektor informal.

Fakta tentang tanah di Indonesia dapat dilihat dari hasil Sensus Pertanian 2013, tercatat sekitar 55 persen rumah tangga pertanian memiliki tanah kurang dari 0.5 Ha. Keadaan penguasaan tanah sejumlah tersebut tentunya sangat sukar untuk mendukung kesejahteraan petani atau dengan kata lain pada tahun 2013 lebih dari separo dari total rumah tangga petani di Indonesia merupakan penduduk kategori miskin. Hal ini sejalan dengan kriteria Sayogyo tentang rumah tangga pertanian yang beranggota lima orang harus menghasilkan 1600 kg beras setahun yang setara dengan penguasaan tanah seluas 0.575 Ha agar dapat keluar dari kategori miskin. Selanjutnya Todaro (1993) menjelaskan bahwa kepemilikan tanah yang sempit mengakibatkan anjloknya tingkat produksi yang jauh lebih rendah dari tingkat subsisten sehingga menyebabkan meningkatnya kerapuhan ekonomi para petani yang pada akhirnya memperparah kemiskinan.

Sedangkan fakta tentang ketimpangan penguasaan tanah dijelaskan Karimi (2014) bahwa gini ratio penguasaan tanah pertanian di Indonesia dari tahun 1973 hingga tahun 2013 berada diatas angka 0,5. Sementara itu *Institute for Development of Economis and Finance* (INDEF) justru mengeluarkan angka gini ratio penguasaan tanah pertanian yang lebih tinggi. Dengan menggunakan data sensus pertanian tahun 2013 INDEF mencatat bahwa secara global di Indonesia angka gini rasio penguasaan tanah pertanian mencapai 0,64. Angka ini merupakan salah satu indikator yang menyatakan bahwa tingkat ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia berada pada tingkat yang parah.

Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau merupakan provinsi yang kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menempati urutan yang utama dari sektor lapangan usaha lainnya. Bahkan untuk provisi Jambi dan Sumbar sektor tersebut menempati urutan pertama. Kontribusi tersebut pada tahun 2013 masing-masing sebesar 24,68 persen; 25,63 persen dan 4,40 persen dari total PDRB. Secara umum masalah yang dihadapi sektor pertanian di kedua provinsi tidak jauh berbeda dengan yang dihadapi nasional.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya tanah yang tersedia maka diperlukan perencanaan alokasi sumber daya tanah untuk kebutuhan berbagai sektor ekonomi. Dalam kaitan ini, penelitian tentang ketersediaan sumber daya tanah dan distribusi penguasaan tanah sangat diperlukan agar pihak

berwenang dapat menetapkan kebijakan yang tepat. Sejauh ini masih sedikit penelitian yang berkaitan dengan ketimpangan di sektor pertanian. Hal ini karena keterbatasan ketersediaan data yang akurat. Oleh karena itu Penelitian ini diharapkan mampu menjawab persoalan ketimpangan penguasaan tanah di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat asumsi bahwa terdapat hubungan yang linier antara pola penguasaan tanah dengan pendapatan rumah tangga. Banyak pakar sosial ekonomi pedesaan yang mengemukakan bahwa ketimpangan penguasaan tanah telah menyebabkan ketimpangan struktur pendapatan, karena petani tanah luas berhasil melakukan akumulasi modal dan melakukan perluasan usaha baik pada usaha tani maupun pada usaha mono pertanian. Pertanyaannya adalah dalam kondisi dewasa ini, dimana kesempatan kerja dan kesempatan berusaha mulai terbuka, ditengah gencarnya pembangunan pedesaan melalui berbagai macam program pembangunan pedesaan apakah masih menunjukkan dinamika pola hubungan yang sama, terdapat variasi, atau bahkan sudah mengalami pergeseran-pergeseran. Kajian tersebut sangat menarik untuk dikaji lebih dalam baik melalui studi historis maupun kajian empiris di lapangan.

Berdasarkan paparan sebelumnya masalah ketimpangan penguasaan tanah menjadi sangat menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji tentang “Determinan Ketimpangan Penguasaan Tanah Studi Kasus pada Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau”. Hal ini karena ketimpangan penguasaan tanah diduga merupakan salah satu penyebab lambannya laju pertumbuhan ekonomi dan penurunan kesejahteraan masyarakat pada kedua provinsi.

B. Perumusan Masalah

Sektor pertanian masih menjadi andalan dalam perekonomian Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Walaupun menjadi sektor andalan laju pertumbuhannya cenderung berfluktuatif bahkan dengan *trend* yang menurun untuk kedua provinsi. Hal ini bisa dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tiap provinsi. Berdasarkan data BPS untuk kurun waktu 2012-2016 laju pertumbuhan riil PDRB untuk Provinsi Sumatera Barat rata-rata 4 persen, Provinsi Jambi rata-

rata 6 persen dan Provinsi Riau diatas 2,5 persen. Salah satu penyebab *Trend* laju pertumbuhan PDRB yang cenderung menurun adalah masalah produksi pertanian.

Pembahasan tentang produksi pertanian tentunya tidak terlepas dari masalah faktor produksi. Salah satu faktor produksi yang penting dalam pertanian adalah ketersediaan sumber daya tanah yang memadai. Karimi (2014) menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir masalah kelangkaan tanah mulai terasa karena tekanan jumlah penduduk dan pembangunan ekonomi yang pesat. Hal ini pernah dinyatakan Karimi (1988) bahwa walaupun ketimpangan tanah belum pada tingkat keparahan yang tinggi di beberapa provinsi di Sumatera namun wilayah ini menjadi daerah program transmigrasi bagi penduduk pulau Jawa kemudian ditambah dengan laju pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahun. Fenomena ini mengakibatkan terjadinya kapitalisasi pertanian yang berimplikasi terhadap peralihan lahan pertanian menjadi perumahan, rumah-rumah pertokoan, kawasan industri maupun mal-mal sehingga dari tahun ke tahun angka ketimpangan penguasaan tanah semakin meningkat.

Berdasarkan data BPS tentang penggunaan tanah, pada tahun 2012 proporsi luas penggunaan tanah terbesar untuk Provinsi Sumatera Barat dan Jambi adalah pada sektor perkebunan yaitu 10 persen untuk Provinsi Sumatera Barat dan 24,51 persen untuk Provinsi Jambi. Sementara itu kepemilikan tanah perkebunan umumnya di dominasi oleh petani yang memiliki modal yang besar. Hal ini juga dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan penguasaan tanah.

Fakta lain tentang kepemilikan tanah di Sumatera Barat dan Jambi dapat dilihat dari hasil Sensus Pertanian tahun 2013. Berdasarkan data ST 2013 tercatat 43,28 persen rumah tangga petani di Sumatera Barat menguasai tanah kurang dari 0,5 Ha sedangkan untuk Provinsi Jambi dan Riau angkanya jauh lebih kecil yaitu masing-masing 16,29 persen dan 12,06 persen. Rumah tangga petani dengan kepemilikan tanah kurang dari 0,5 Ha termasuk kategori rumah tangga miskin. Hal ini sejalan dengan kriteria Sayogyo tentang rumah tangga pertanian yang beranggota lima orang harus menghasilkan 1600 kg beras setahun yang setara dengan penguasaan tanah seluas 0.575 Ha agar dapat mencapai kesejahteraan.

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi ketimpangan pendapatan petani ketimpangan penguasaan tanah, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau tahun 2004 dan tahun 2014?
2. Bagaimana pengaruh ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian terhadap ketimpangan penguasaan tanah di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau tahun 2004 dan tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini secara khusus bertujuan untuk:

1. Menganalisis kondisi ketimpangan penguasaan tanah, ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau tahun 2004 dan tahun 2014
2. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian terhadap ketimpangan penguasaan tanah di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi dan Provinsi Riau tahun 2004 dan tahun 2014

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi pengambil kebijakan, peneliti, akademisi, maupun masyarakat luas baik dalam aspek teoritis maupun praktis.

A. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan bagi perkembangan pengetahuan ilmu sosial, secara khusus ilmu Perencanaan Pembangunan, berkaitan dengan ketimpangan penguasaan tanah, ketimpangan pendapatan, ketimpangan pendidikan dan penguasaan luas bangunan tempat tinggal perspektif sektor pertanian di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau disamping itu diharapkan dapat

memperkaya didalam penggunaan konsep dan kerangka teoritik ketimpangan tanah dan pendapatan didalam proses kegiatan penelitian maupun akademik.

B. Manfaat Praktis

Memberikan dan menyediakan varian pengetahuan sebagai bahan masukan, terkait dengan ketimpangan tanah, ketimpangan pendapatan, dan status pekerjaan perspektif sektor pertanian didalam perumusan dan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau serta dapat memberikan informasi bagi khalayak umum berkaitan dengan pentingnya memahami masalah ketimpangan tanah dan pendapatan petani di Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau dalam rangka mengurangi kemiskinan.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan ruang lingkup Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau yang mencakup kecamatan yang ada pada ketiga Provinsi dengan memanfaatkan data rumah tangga pertanian yang ada dalam Survei Pendapatan Petani (SPP) tahun 2004 dan 2014 serta data lain yang sudah diterbitkan oleh BPS.

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan penelitian yang menjadi objek dalam penelitian ini meliputi ketimpangan penguasaan tanah, ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian. Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah ketimpangan penguasaan tanah dan yang menjadi variabel bebas adalah ketimpangan pendapatan petani, jumlah yang berusaha di sektor pertanian dan jumlah buruh nonpertanian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami secara rinci yang terkandung dalam penulisan ini maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya bab 2 tinjauan literatur menguraikan tentang konsep definisi variabel yang diteliti, faktor-faktor yang mempengaruhi, teori yang digunakan, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang menjadi acuan dan dapat menjadi pembanding bagi penelitian penulis serta kerangka analisis dalam

melakukan penelitian ini. Kemudian bab 3 kerangka teori dan metodologi penelitian memuat kerangka teori, model penelitian, metode pengolahan dan analisis data. Selanjutnya bab 4 deskripsi daerah penelitian, bab ini menguraikan tentang kondisi fisik, kondisi ekonomi dan kondisi pertanian pada Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau dilanjutkan dengan bab 5 tentang penemuan empiris, yang menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dan bab terakhir bab 6 Penutup menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta rekomendasi atau saran.

